

PENGGANDAAN BASIS DI DALAM LINGKUP PEREKONOMIAN REGIONAL WILAYAH TAPAL KUDA DALAM PERIODE SEBELUM MAUPUN SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Agus Supriono, M. Rondhi, Ati Kusmiati
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/ Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Jember

ABSTRACT

Finding on research result is as follow: First; investment on economic sector of basis in sub-region of Madura Island, sub-region of Madura Gulf and also Kabupaten Sumenep as well as Sidoarjo, either in the period of before and after regional autonomy has relatively good role in encouraging development of regional economy, particularly in encouraging export sector to outer region. Second; investment on economic sector of basis in City of Surabaya, Pasuruan and Probolinggo either in the period of before and after regional autonomy has relatively good role in encouraging development of regional economy, particularly in encouraging the development of export sector to outer region. Third; investment on economic sector of basis in sub-region of Madura strait and also in Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, as well as Situbondo, either in the period of before and after regional autonomy had caused the increase of demand for production in the economic sector of non-basis.

Key Words: regional economy, base multiplier, Horse Shoe area, before and after regional autonomy

PENDAHULUAN

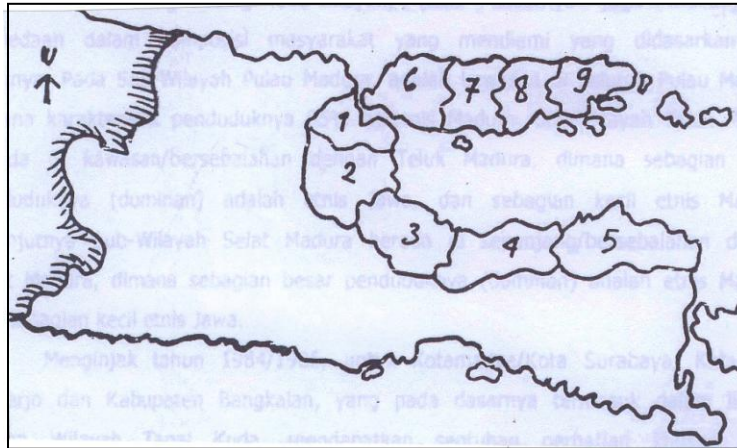
Wilayah Tapal Kuda (WTK) di Provinsi Jawa Timur bukan sebagai unit daerah administratif (*administrative region*) tertentu. Istilah WTK ini muncul menjelang pelaksanaan Pemilu 1977, yaitu guna mengidentifikasi suatu konsentrasi teritorial wilayah yang ‘pada saat itu dipandang rentan’ terhadap pergolakan sosial, politik, dan keamanan (berskala lokasional/regional).

Adapun tujuan dari pengidentifikasinya adalah guna memudahkan pelaksanaan fungsi-fungsi aparat keamanan dalam rangka menghindarkan faktor HTAG (hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan) terhadap Ipoleksosbud-Hankam-Ag (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta agama) ‘yang dipandang relatif banyak muncul’ di dalam lingkup wilayah ini. Oleh karena itu menurut Supriono (1994), pendefinisian WTK ini pada tahap-tahap awalnya

dimunculkan oleh pihak keamanan, pada khususnya militer.

Dengan demikian di dalam tataran disiplin ekonomi regional, istilah WTK ini dibangun dari per definisi dalam ‘persepektif pandangan subyektif’. Persepektif pandangan subyektif adalah memandang suatu wilayah sebagai suatu subyek kongkrit, dimana dipandang sebagai alat deskriptif, didefinisikan menurut kriteria tertentu, untuk tujuan atau kepentingan tertentu (Glasson, 1978).

Secara teritorial (berkenaan dengan posisi geografisnya), kesatuan WTK dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub-wilayah, yaitu: (a) Pulau Madura (meliputi Kabupaten: Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Kabupaten Sumenep), (b) Teluk Madura (meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo), dan (c) Selat Madura (meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, serta Kabupaten Situbondo). Dapat lebih dicermati pada Gambar 1.



Gambar 1.

Sketsa Peta Teritorial Wilayah Tapal Kuda di Provinsi Jawa Timur: 1=Kota Surabaya, 2=Kab. Sidoarjo, 3=Kab. & Kota Pasuruan, 4=Kab. & Kota Probolinggo, 5=Kab. Situbondo, 6=Kab. Bangkalan, 7=Kab. Sampang, 8=Kab. Pamekasan, 9=Kab. Sumenep

Selama ini memang dapat dijumpai relatif banyak penelitian yang mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkup WTK ini. Namun demikian sebagian terbesar mengkaji dari sisi ditinjau aspek sosial, budaya, dan politik. Sedangkan yang mengkaji dari sisi tinjauan perkembangan ekonomi regionalnya, masih relatif terbatas.

Berawal dari kenyataan ini maka penelitian ini dilakukan, yaitu dengan maksud untuk dapat memberikan sumbangan informasi empirik tentang fenomena perkembangan ekonomi regional di dalam lingkup WTK tersebut. Pada khususnya informasi empirik tentang potensi penggandaan basis (*base multiplier*), baik dalam periode sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Dimana di dalam konteks ini WTK dikonsepsikan sebagai daerah nodal (*nodal region*).

PERMASALAHAN

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah, apakah terjadi perbedaan yang signifikan terhadap besarnya nilai penggandaan basis (*base multiplier*) di masing-masing sub-wilayah dan kabupaten/kota yang berada di dalam lingkup WTK tersebut, antara periode sebelum dengan setelah pelaksanaan otonomi daerah.

TUJUAN PENELITIAN

Adalah untuk mengestimasi nilai kembalian (*outcome*) yang dapat diperoleh dari setiap satuan investasi yang ditanamkan pada sektor ekonomi basis di masing-masing sub-wilayah dan kabupaten/kota yang berada di dalam lingkup WTK tersebut, baik pada periode sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah.

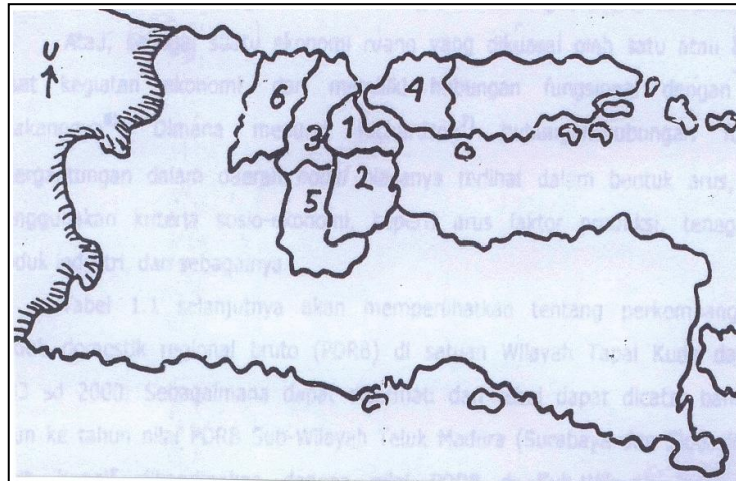
TINJAUAN PUSATAKA

• **Konsepsi Wilayah Tapal Kuda (WTK) Sebagai Daerah Nodal**

Meskipun dibangun dari per definisi perspektif pandangan subyektif, namun demikian dalam tataran ‘perspektif pandangan obyektif’ WTK ini juga dapat dipandang sebagai suatu ekonomi ruang (*economic space*) tertentu, dan secara obyektif dapat didefinisikan sebagai ‘daerah nodal (*nodal region*)’. Dinyatakan oleh Soekirno (1976) dan Budiharsono (2001), daerah nodal adalah sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi (*growth area*) dan memiliki hubungan fungsional dengan daerah-daerah belakangnya (*backwash area*). Dimana dinyatakan oleh Richardson (2001), bentuk-bentuk hubungan-hubungan fungsional ketergantungan tersebut dapat dicermati dalam ‘bentuk arus’ dalam kriteria tinjauan ‘sosio-ekonomi’. Seperti hanya arus faktor produksi, arus tenaga kerja, arus produk industri, dan sebagainya.

Apa alasan yang mendasarinya? Supriono (1994) menyatakan, setidaknya hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan perencanaan pengembangan ekonomi terpadu ‘Gerbangkertosusilo’ yang dimunculkan sejak tahun 1985 (*cat.*: pada saat Gubernur Jawa Timur dijabat oleh Soenandar Prijo Soedarmo). Yaitu guna menciptakan suatu kawasan pusat

pertumbuhan ekonomi (*growth pole*) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dimana di dalam kawasan ini diharapkan dan diyakini akan dapat tercipta proses ‘aglomerasi’ karena dipandang memiliki potensi keuntungan-keuntungan lokasional yang cukup bagus.



Gambar 2.

Sketsa Peta Teritorial Pengembangan Ekonomi Terpadu ‘Gerbangkertosusilo’ di Provinsi Jawa Timur: 1=Kota Surabaya, 2=Kab. Sidoarjo, 3=Kab. Gresik, 4=Kab. Bangkalan, 5=Kab. Mojokerto, dan 6=Kab. Lamongan

Dinyatakan oleh Djojodipuro (1992), aglomerasi adalah terkumpulnya berbagai jenis kegiatan industri, perdagangan, dan jasa-jasa di suatu kawasan (wilayah) tertentu, karena adanya keuntungan-keuntungan lokasional yang dimilikinya, sehingga dapat mendukung terciptanya peluang-peluang ‘penghematan eksternal’ (*external economic benefit*) yang dapat dinikmati oleh para pelaku usaha yang ada di dalam lingkup kawasan (wilayah) tersebut. Sedangkan istilah Gerbangkertosusilo sendiri merupakan singkatan dari rangkaian daerah (wilayah) yang meliputi: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, serta Lamongan. Dapat lebih dicermati Gambar 2.

Berdasarkan data-data empiris yang dapat dipelajari, sampai dengan saat ini masing-masing Kabupaten/Kota di yang berada di dalam kawasan Gerbangkertosusilo tersebut, terkecuali Kabupaten Bangkalan, memang telah tumbuh dan berkembang menjadi kawasan pusat pertumbuhan

ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu di dalam konteks WTK yang didefinisikan sebagai daerah nodal, maka Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo (*cat.*: sub-wilayah Teluk Madura), dapat dipandang dan didudukkan sebagai daerah pusat pertumbuhan (*growth area*).

Demikian pula berdasarkan pada data-data empiris yang dapat dipelajari, sampai sejauh ini perkembangan ekonomi regional di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (*cat.*: sub-wilayah Pulau Madura), relatif lebih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan ekonomi regional di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan ekonomi regional di Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Probolinggo, serta Kabupaten Situbondo (*cat.*: sub-wilayah Selat Madura), juga relatif lebih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan ekonomi regional di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo tersebut. Berdasarkan argumentasi ini maka di dalam konteks

WTK yang didefinisikan sebagai daerah nodal, sub-wilayah Pulau Madura dan Selat Madura tersebut, dapat dipandang dan didudukkan sebagai sebagai daerah belakang (*backwase area*).

• **Teori Penggandaan Basis (*Base Multiplier*)**

Aktivitas (kegiatan) sektor ekonomi basis (*base economic*) mempunyai peranan sebagai penggerak (pendorong) utama (*primer mover role*) di dalam perekonomian regional suatu daerah. Artinya menurut Glasson (1978) dan Sitohang (1990), bahwa setiap perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi basis yang ada, akan memiliki dampak lanjutan (*base multiplier*) yang akan memberikan respon (pengaruh) terhadap perubahan yang terjadi di dalam perekonomian regional daerah tersebut secara keseluruhan (komprehensif).

Lebih jauh oleh Glasson (1978) dan Sitohang (1990) menyatakan, bertambah banyaknya (kuatnya) aktivitas (kegiatan) ekonomi basis di suatu daerah, maka akan memberikan dampak positif menambah arus masuknya pendapatan (*income*) 'ke dalam' daerah yang bersangkutan. Dimana arus tambahan pendapatan yang masuk tersebut, akan dipergunakan untuk 2 (dua) hal, yaitu: (a) menambah investasi di aktivitas sektor ekonomi basis, dan (b) menambah permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh aktivitas sektor ekonomi non-basis. Dimana Tiebout (1962) dalam Budiharsono (2002) merumuskan bentuk keterkaitan hubungan perubahan yang terjadi tersebut adalah sebagai berikut:

$$T = B + NB \dots\dots\dots (i)$$

$$NB = aT \dots\dots\dots (ii)$$

Dimana:

- T = Total pendapatan (*income*) dari aktivitas perekonomian regional suatu daerah secara keseluruhan.
- B = Total pendapatan (*income*) dari aktivitas sektor ekonomi basis di daerah yang bersangkutan.
- NB = Total pendapatan (*income*) dari aktivitas sektor ekonomi non-basis di daerah yang bersangkutan.

a = Koefisien yang menyatakan bagian (proporsi) dari perubahan 'T' yang mempengaruhi perubahan 'NB'.

Jika kedua persamaan tersebut disubstitusikan, maka akan didapatkan hubungan persamaan sebagai berikut:

$$T = B + aT \dots\dots\dots (iii)$$

$$T - aT = B \dots\dots\dots (iv)$$

$$T(1-a) = B \dots\dots\dots (v)$$

$$T = (1/(1-a))B \dots\dots\dots (vi)$$

Dimana:

$1/(1-a)$ = Nilai koefisien penggandaan basis (*base multiplier*)

Mendasarkan pada rangkaian persamaan matematik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada aktivitas perekonomian regional di suatu daerah secara keseluruhan, pada gilirannya akan memberikan respon (pengaruh) terhadap perubahan pada aktivitas sektor ekonomi non-basisnya. Dimana proporsi tambahan atau penurunan *income* yang diperoleh oleh aktivitas perekonomian regional secara keseluruhan tersebut, sebesar ' a ' dipergunakan untuk menambah atau menurunkan permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh aktivitas sektor ekonomi non-basis.

Adapun perubahan yang terjadi pada aktivitas perekonomian regional secara keseluruhan tersebut, pada dasarnya 'digerakkan' oleh perubahan yang terjadi pada aktivitas sektor ekonomi basis. Dimana besarnya respon (pengaruh) perubahan yang terjadi pada aktivitas sektor ekonomi basis terhadap aktivitas perekonomian regional secara keseluruhan tersebut, adalah sebesar ' $1/(1-a)$ '. Nilai ' $1/(1-a)$ ' ini disebut sebagai nilai penggandaan basis (*base multiplier*).

Oleh karena nilai ‘ a ’ yang sebenarnya belum dapat diketahui, maka selanjutnya Tiebout (1962) dalam Budiharsono (2002) lebih memperjelas konsepsi penggandaan basis ini yaitu melalui persamaan-persamaan sebagai berikut:

$$T = (1/(1-a))B \dots\dots\dots(vi^*)$$

$$= MB \dots\dots\dots(vii)$$

$$M = T/B \dots\dots\dots(viii)$$

$$= 1/(B/T)\dots\dots\dots(ix)$$

$$= 1/((T-NB)/T)\dots\dots\dots(x)$$

$$= 1/((T/T)-(NB/T))\dots\dots\dots(xi)$$

$$= 1/((1-(NB/T))\dots\dots\dots(xii)$$

Sehingga dapat diperoleh persamaan:

$$T = 1/((1-(NB/T))NB \dots\dots\dots(xiii)$$

Dan:

$$M = 1/((1-(NB/T))\dots\dots\dots(xiv)$$

Dimana:

M = Nilai koefisien penggandaan basis (*base multiplier*).

Rumus penggandaan basis tersebut sebelumnya dapat dipergunakan guna mengestimasi nilai penggandaan basis jangka pendek atau per tahun (Budiharsono, 2002). Akan tetapi guna mengestimasi nilai penggandaan basis jangka panjang, dapat dipergunakan pertolongan analisis regresi yang diturunkan dari persamaan ‘(ii)’, yaitu: $NB = aT$. Persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut:

$$NB_i = \alpha + \beta T_i + e_i \dots\dots\dots(xv)$$

Dimana:

T_i = Total pendapatan (*income*) dari aktivitas perekonomian regional suatu daerah secara keseluruhan.

NB_i = Total pendapatan (*income*) dari aktivitas sektor ekonomi non-basis di daerah yang bersangkutan.

α = Konstanta (*intercept*)

β = Koefisien regresi yang menyatakan bagian (proporsi) dari perubahan ‘ T ’ yang mempengaruhi perubahan ‘ NB ’.

e_i = *Error term*

Sehingga nilai penggandaan basis dapat diestimasi sebagai berikut:

$$M = 1/(1-\beta) \dots\dots\dots(xvi)$$

Namun demikian menurut Budiharsono (2002) yang perlu diingat (diperhatikan) adalah, bahwa model pendugaan penggandaan basis jangka panjang tersebut biasanya akan terbentur pada permasalahan *time lag*. Akan tetapi masalah ini dapat diabaikan, mengingat setiap data jangka panjang (*time series*) hampir selalu mengandung unsur *time lag* tersebut.

METODOLOGI

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku 1983-2007 (*time series*). Data PDRB tahun 1983-1999, adalah muatan data yang menggambarkan kondisi perekonomian regional dalam periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Adapun data PDRB tahun 2000-2007, adalah muatan data yang menggambarkan kondisi perekonomian regional dalam periode setelah pelaksanaan otonomi daerah.

Pendekatan analisis yang dipergunakan guna menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah ‘analisis regresi’. Mendasarkan pada Budiharsono (2002) dan Supriono (2004), aplikasi rumus persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut:

$$NB_i = \alpha + \beta T_i + e_i \dots\dots\dots(xv^*)$$

Dimana:

- T_i = Total nilai PDRB.
 NB_i = Total nilai PDRB sektor ekonomi non-basis.
 α = Konstanta (*intercept*)
 β = Koefisien regresi yang menyatakan bagian (proporsi) dari perubahan 'T' yang mempengaruhi perubahan 'NB'.
 e_i = *Error term*

Akan tetapi oleh karena pencermatan dilakukan dalam 2 (dua) periode waktu yang berbeda, maka guna mencermatinya dipergunakan pertolongan variabel *dummy*. Adapun persamaan garis regresi pengembangannya adalah sebagai berikut:

$$NB_i = \alpha + \beta T_i + D_i + e_i \dots\dots\dots(xvii)$$

Dimana:

- D_i = *Dummy variable*
0 = Periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah
1 = Periode setelah pelaksanaan otonomi daerah

PEMBAHASAN

• Sub-Wilayah Pulau Madura

Pada periode sebelum otonomi daerah, nilai penggandaan basis (*base multiplier*) di sub-wilayah Pulau Madura adalah sekitar 6,22. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, pada periode sebelum otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor ekonomi basis di sub-wilayah ini, akan menghasilkan nilai keluaran (*outcome*) pada total perekonomian regionalnya sebesar 6,221 satuan mata uang (Rp 6,221).

Adapun nilai penggandaan basis pada periode setelah otonomi daerah, tercatat meningkat secara signifikan menjadi sekitar 6,67. Selisih peningkatannya dari sebelum otonomi daerah, adalah sebesar nilai *dummy* variabel. Hal ini dapat mengisyaratkan bahwa, pada periode setelah otonomi daerah setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor ekonomi basis di sub-wilayah, akan menghasilkan nilai keluaran (*outcome*) pada total perekonomian regionalnya sebesar 6,272 satuan mata uang (Rp 6,272).

Tabel 1. Nilai Penggandaan Basis di dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah

	Sub.Wilayah/ Kabupaten/Kota	Ajusted R-Square	Koef. Regresi Respon T_i Terhadap NB_i	Nilai Dummy Variable	Nilai Base Multiplier
1	Sub-Wil. Pulau Madura	0,952	0,839*	0,451*	6,221
	1.1 Kab. Sumenep	0,931	0,654*	0,761*	2,890
	1.2 Kab. Pamekasan	0,938	1,316*	- 0,258	-3,165
	1.3 Kab. Sampang	0,871	1,329*	- 0,216	-3,040
	1.4 Kab. Bangkalan	0,896	1,333*	- 0,370	-3,003
2	Sub-Wil. Teluk Madura	0,779	0,232*	1,704*	1,302
	2.1 Kota Surabaya	0,753	0,369*	0,906	1,585
	2.2 Kab. Sidoarjo	0,970	0,888*	0,382*	8,929
3	Sub-Wil. Selat Madura	0,953	1,408*	- 0,167	-2,451
	3.1 Kab. Pasuruan	0,926	1,123*	- 0,001	-8,130
	3.2 Kota Pasuruan	0,947	0,891*	0,581	9,174
	3.3 Kab. Probolinggo	0,995	1,287*	- 0,113	-3,484
	3.4 Kota Probolinggo	0,937	0,986*	0,177	71,429
	3.5 Kab. Situbondo	0,938	1,063*	- 0,079	-15,873

Keterangan:

- (*) = Menyatakan signifikan pada taraf kepercayaan uji statistik 5%
 Y_i = Nilai total PDRB sektor ekonomi menurut harga berlaku di daerah *ke-i*
 YN_i = Nilai total PDRB sektor ekonomi non-basis menurut harga berlaku di daerah *ke-i*

Keberadaan penggandaan basis yang bernilai positif dan relatif tinggi baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah tersebut, dapat menunjukkan bahwa sektor dan sub-sektor ekonomi basis di sub-wilayah Selat Madura secara umum, memiliki peran yang relatif tinggi dalam mendorong perkembangan perekonomian regional sub-wilayah ini. Yaitu terutama dalam mendorong perkembangan sektor dan sub-sektor ekspor ke luar sub-wilayah. Namun demikian kekuatan peran sektor dan sub-sektor ekonomi basis dalam mendorong perkembangan perekonomian regional sub-wilayah ini pada setelah otonomi daerah, teridentifikasi relatif lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah.

- **Sub-Wilayah Teluk Madura**

Pada periode sebelum otonomi daerah, nilai penggandaan basis di sub-wilayah Teluk Madura adalah sekitar 1,302. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, pada periode sebelum otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor ekonomi basis di sub-wilayah ini, akan menghasilkan nilai *outcome* pada total perekonomian regionalnya sebesar 1,302 satuan mata uang (Rp 1,302).

Adapun nilai penggandaan basis pada periode setelah otonomi daerah, tercatat meningkat secara signifikan menjadi sekitar 3,006. Selisih peningkatannya dari sebelum otonomi daerah, adalah sebesar nilai *dummy* variabel. Hal ini dapat mengisyaratkan bahwa, pada periode setelah otonomi daerah setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor ekonomi basis di sub-wilayah ini, akan menghasilkan nilai *outcome* pada total perekonomian regionalnya sebesar 3,006 satuan mata uang (Rp 3,006).

Keberadaan penggandaan basis yang bernilai positif dan cukup tinggi baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah tersebut, dapat menunjukkan bahwa sektor dan sub-sektor ekonomi basis di sub-wilayah Teluk Madura ini, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perkembangan perekonomian regional sub-wilayah tersebut. Yaitu terutama mendorong perkembangan sektor dan sub-sektor ekspor ke luar sub-wilayah. Namun demikian

kekuatan peran sektor dan sub-sektor ekonomi basis dalam mendorong perkembangan perekonomian regional sub-wilayah ini pada setelah otonomi daerah, teridentifikasi relatif lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah.

- **Sub-Wilayah Selat Madura**

Nilai penggandaan basis di sub-wilayah Selat Madura adalah negatif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di sub-wilayah ini adalah sebesar -2,451. Hal ini dapat dipresentasikan bahwa baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di sub-wilayah Selat Madura ini, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor dan sub-sektor ekonomi non-basis dari luar sub wilayah, yaitu senilai 2,451 satuan mata uang (Rp 2,451).

- **Kabupaten Sumenep**

Nilai penggandaan basis di Kabupaten Sumenep pada periode sebelum otonomi daerah teridentifikasi bernilai positif, yaitu sebesar 2,89. Dapat diinterpretasikan bahwa pada sebelum otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang yang diinvestasikan (Rp 1) pada sektor dan sub-sektor ekonomi basis di kabupaten ini, dapat menghasilkan *outcome* pada total perekonomian regionalnya sebesar 2,89 satuan mata uang (Rp 2,89).

Nilai penggandaan basis di Kabupaten Sumenep ini pada periode setelah otonomi daerah teridentifikasi bernilai positif, dan meningkat secara signifikan dari periode sebelum otonomi daerah. Selisih peningkatannya dari sebelum otonomi daerah adalah sebesar nilai variabel *dummy*. Nilai penggandaan basis pada setelah otonomi daerah tersebut adalah 3,651. Dimana hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor ekonomi basis di kabupaten ini, dapat memberikan *outcome* bagi total perekonomian regionalnya sebesar (Rp 3,651).

Keberadaan penggandaan basis yang bernilai positif dan cukup tinggi baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah tersebut, dapat menunjukkan bahwa sektor dan sub-sektor ekonomi basis di kabupaten ini, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perkembangan perekonomian regional kabupaten ini. Terutama dalam mendorong perkembangan sektor dan sub-sektor ekspor ke luar wilayah kabupaten. Dapat diketahui pada setelah otonomi daerah, kekuatan peran sektor dan sub-sektor ekonomi basis dalam mendorong perkembangan perekonomian regional di kabupaten ini, teridentifikasi relatif lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah.

- **Kabupaten Pamekasan**

Nilai penggandaan basis di Kabupaten Pamekasan adalah negatif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kabupaten Pamekasan tersebut adalah sebesar -3,165. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di kabupaten ini, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor dan sub-sektor ekonomi non-basis dari luar wilayah kabupaten, yaitu senilai 3,165 satuan mata uang (Rp 3,165).

- **Kabupaten Sampang**

Demikian pula nilai penggandaan basis di Kabupaten Sampang adalah negatif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kabupaten Sampang tersebut adalah sebesar -3,040. Dimana hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di kabupaten ini, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor dan sub-sektor ekonomi non-basis dari luar wilayah kabupaten, yaitu senilai 3,040 satuan mata uang (Rp 3,040).

- **Kabupaten Bangkalan**

Nilai penggandaan basis di Kabupaten Bangkalan juga negatif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kabupaten Bangkalan tersebut adalah sebesar -3,003. Hal ini juga diinterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di kabupaten ini, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor dan sub-sektor ekonomi non-basis dari luar wilayah kabupaten, yaitu senilai 3,003 satuan mata uang (Rp 3,003).

- **Kota Surabaya**

Adapun nilai penggandaan basis di Kota Surabaya adalah positif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kota Surabaya tersebut adalah sebesar 1,585. Hal demikian ini dapat diinterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di kota ini, dapat memberikan *outcome* bagi total perekonomian regionalnya sebesar (Rp 1,585).

Keberadaan penggandaan basis yang bernilai positif baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah tersebut, dapat menunjukkan bahwa sektor dan sub-sektor ekonomi basis di kota ini, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perkembangan perekonomian regionalnya. Terutama dalam mendorong perkembangan sektor dan sub-sektor ekspor ke luar wilayah Kota Surabaya tersebut.

- **Kabupaten Sidoarjo**

Nilai penggandaan basis di Kabupaten Sidoarjo pada periode sebelum otonomi daerah teridentifikasi bernilai positif, yaitu sebesar 8,929. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, pada sebelum otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang yang diinvestasikan (Rp 1) pada sektor dan sub-sektor ekonomi basis di kabupaten ini, dapat menghasilkan *outcome* pada total perekonomian regionalnya sebesar 8,929 satuan mata uang (Rp 8,929).

Nilai penggandaan basis di Kabupaten Sidoarjo pada periode setelah otonomi daerah teridentifikasi bernilai positif dan meningkat secara signifikan dari periode sebelum otonomi daerah. Selisih peningkatannya dari sebelum otonomi daerah adalah sebesar nilai variabel *dummy*. Nilai penggandaan basis pada setelah otonomi daerah tersebut adalah 9,311. Kenyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa pada setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor ekonomi basis di Kabupaten Sidoarjo tersebut, dapat memberikan *outcome* bagi total perekonomian regionalnya sebesar (Rp 9,311).

Keberadaan penggandaan basis yang bernilai positif dan cukup besar baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah tersebut, dapat menunjukkan bahwa sektor dan sub-sektor ekonomi basis di ini, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perkembangan perekonomian regionalnya. Terutama dalam mendorong perkembangan sektor dan sub-sektor ekspor ke luar wilayah kabupaten. Diketahui pada setelah otonomi daerah, kekuatan peran sektor dan sub-sektor ekonomi basis dalam mendorong perkembangan perekonomian regional kabupaten ini, tercatat relatif lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah.

- **Kabupaten Pasuruan**

Nilai penggandaan basis di Kabupaten Pasuruan adalah negatif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kabupaten Pasuruan tersebut adalah sebesar -8,130. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di ini, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor dan sub-sektor ekonomi non-basis dari luar kabupaten, yaitu senilai 8,130 satuan mata uang (Rp 8,130).

- **Kota Pasuruan**

Adapun nilai penggandaan basis di Kota Pasuruan adalah positif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara

sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kota Pasuruan tersebut adalah sebesar 9,174. Hal ini dapat menginterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di kota ini, dapat memberikan *outcome* bagi total perekonomian regionalnya sebesar (Rp 9,174).

Keberadaan penggandaan basis yang bernilai positif baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah ini, dapat menunjukkan bahwa sektor dan sub-sektor ekonomi basis di Kota Pasuruan tersebut, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perkembangan perekonomian regionalnya. Yaitu terutama dalam mendorong perkembangan sektor dan sub-sektor ekspor ke luar wilayahnya.

- **Kabupaten Probolinggo**

Demikian pula nilai penggandaan basis di Kabupaten Probolinggo adalah negatif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kabupaten Probolinggo tersebut adalah sebesar -3,484. Maka dapat diinterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di kabupaten, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor dan sub-sektor ekonomi non-basis dari luar kabupaten, yaitu senilai 3,484 satuan mata uang (Rp 3,484).

- **Kota Probolinggo**

Nilai penggandaan basis di Kota Probolinggo adalah positif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kota Probolinggo tersebut adalah sebesar 71,429. Dimana hal ini dapat menginterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di kota ini, dapat memberikan *outcome* bagi total perekonomian regionalnya sebesar (Rp 71,429).

Keberadaan penggandaan basis yang bernilai positif dan relatif cukup tinggi baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah ini, dapat menunjukkan bahwa sektor dan sub-sektor ekonomi basis di Kota Pobolinggo tersebut, memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perkembangan perekonomian regionalnya. Yaitu terutama dalam mendorong perkembangan sektor dan sub-sektor ekspor ke luar wilayahnya.

- **Kabupaten Situbondo**

Nilai penggandaan basis di Kabupaten Situbondo adalah negatif dan tidak menunjukkan indikasi berbeda nyata antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Nilai penggandaan basis di Kabupaten Situbondo tersebut adalah sebesar -15,873. Dimana hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, baik pada sebelum dan setelah otonomi daerah, setiap satu satuan mata uang (Rp 1) yang diinvestasikan pada sektor dan sub-sektor basis di kabupaten ini, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor dan sub-sektor ekonomi non-basis dari luar wilayahnya, yaitu senilai 15,873 satuan mata uang (Rp 15,873).

KESIMPULAN

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari argumentasi-argumentasi tersebut antara lain sebagai berikut:

(1) Nilai penggandaan basis di sub-wilayah Pulau Madura dan Teluk Madura adalah positif serta *dummy variable* menunjukkan nilai positif dan signifikan. Artinya bahwa investasi yang ditanamkan pada sektor ekonomi basis di kedua sub-wilayah ini, baik dalam periode sebelum maupun setelah otonomi daerah, memiliki peran yang relatif baik dalam mendorong perkembangan perekonomian regionalnya. Terutama dalam mendorong perkembangan sektor ekspor ke luar wilayahnya. Dimana kekuatan peran dalam mendorong perkembangan sektor ekspor tersebut dalam periode setelah otonomi daerah relatif lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah.

- (2) Nilai penggandaan basis di sub-wilayah Selat Madura adalah negatif serta *dummy variable*-nya tidak signifikan. Artinya bahwa investasi yang ditanamkan pada sektor ekonomi basis di sub-wilayah ini, baik pada periode sebelum maupun setelah otonomi daerah, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor ekonomi non-basis. Adapun kondisinya baik dalam periode sebelum maupun setelah otonomi daerah relatif sama (tidak berbeda).
- (3) Nilai penggandaan basis di Kabupaten Sumenep dan Sidoarjo adalah positif serta *dummy variable*-nya juga bernilai positif dan signifikan. Artinya bahwa investasi pada sektor ekonomi basis di kedua kabupaten ini, baik dalam periode sebelum maupun setelah otonomi daerah, memiliki peran yang relatif baik dalam mendorong perkembangan perekonomian regionalnya. Terutama dalam mendorong perkembangan sektor ekspor ke luar wilayahnya. Dimana kekuatan peran dalam mendorong perkembangan sektor ekspor tersebut dalam periode setelah otonomi daerah relatif lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah.
- (4) Nilai penggandaan basis di Kota Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo adalah positif akan tetapi *dummy variable*-nya tidak signifikan. Artinya bahwa investasi pada sektor ekonomi basis di ketiga kota ini, baik dalam periode sebelum maupun setelah otonomi daerah, memiliki peran yang relatif baik dalam mendorong perkembangan perekonomian regionalnya. Terutama dalam mendorong perkembangan sektor ekspor ke luar wilayahnya. Akan tetapi kondisi dalam periode sebelum maupun setelah otonomi daerah tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (relatif sama).
- (5) Nilai penggandaan basis di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pemekasan, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo adalah negatif serta *dummy variable*-nya tidak signifikan. Artinya bahwa investasi pada sektor dan sub-sektor

ekonomi basis di keenam kabupaten ini, baik pada periode sebelum maupun setelah otonomi daerah, justru menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi sektor ekonomi non-basis. Adapun kondisinya baik dalam periode sebelum maupun setelah otonomi daerah relatif sama (tidak berbeda).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Djojodipuro, M. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Glasson, J. 1978. *An Introduction to Regional Planning; Concepts, Theory and Practice*. Second Edition. London: Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd.
- Richardson, H.W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sitohang, P. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sukirno, S. 1976. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Supriono, A. 2004. *Perkembangan Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur*. Tesis S2. Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) – FE – UI.